

BAB III

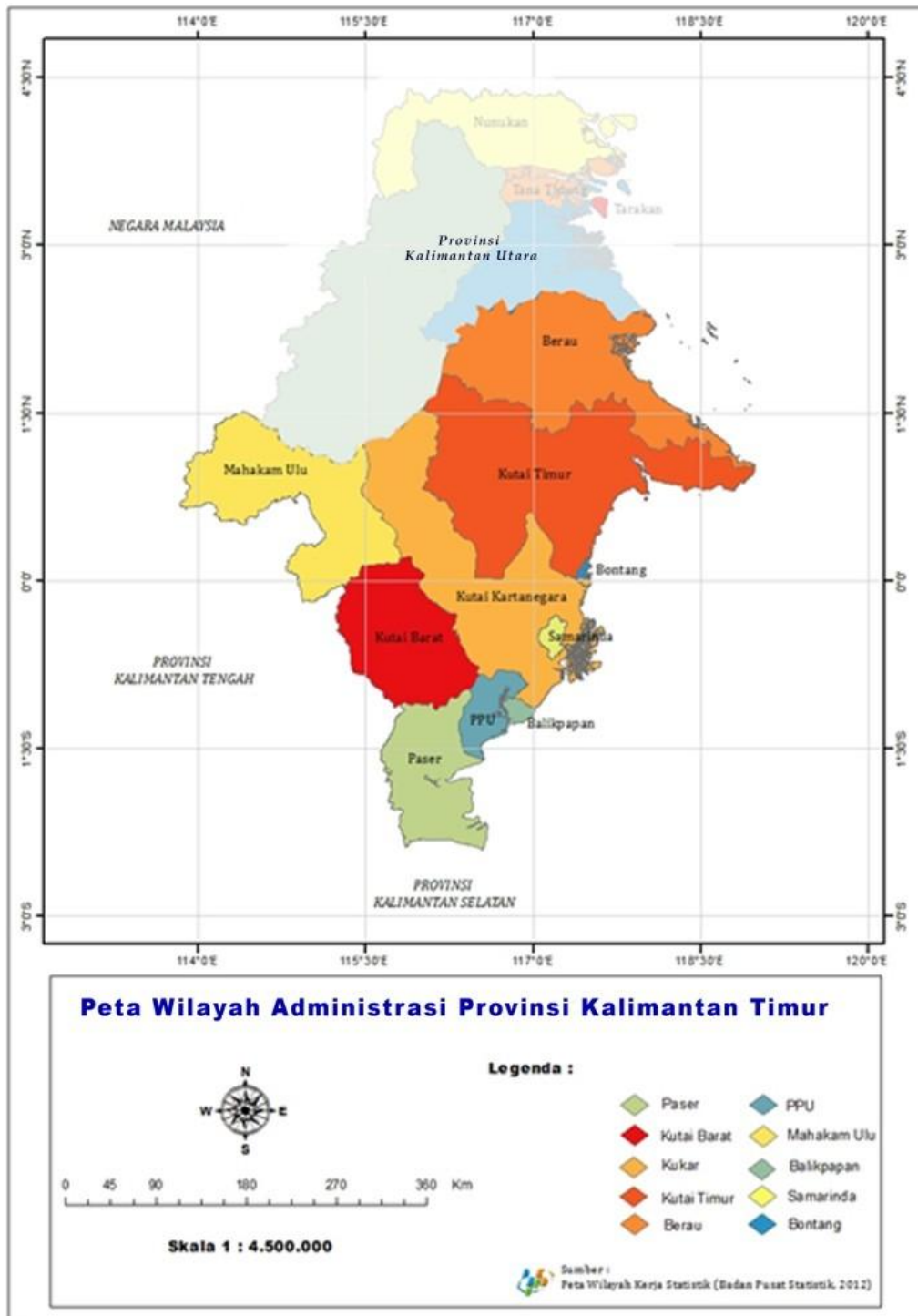
DESKRIPSI WILAYAH

3.1 Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Timur

A. Kondisi Geografis

Provinsi Kalimantan Timur ialah provinsi terbesar di Indonesia setelah Papua, Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah dimana sebagian besar sumber daya alam tersebut masih belum dimanfaatkan dengan optimal. Potensi sumber daya alam beserta hasilnya di ekspor keluar negeri, hal itu membuat provinsi ini merupakan provinsi dengan penghasil devisa utama bagi negara Indonesia, khususnya di sektor pertambangan dan kehutanan.

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai batas wilayah di sebelah utara yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara, di sebelah Timur yang berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat. Pada umumnya Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan dengan jumlah 127.346,92km² dengan luas wilayah 10.217km². Adapun jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 berjumlah sebesar 3.575.449 jiwa dengan tingkat kepadatan 28,07 jiwa/km². (BAPPEDA, 2018)



Gambar 3.1 : Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

B. Topografis Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur memiliki topografi bergelombang dari kemiringan landai hingga curam, dengan masing-masing ketinggian yang berkisar 0-1500 meter di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan 0-60%. Daerah daratan rendah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur pada dasarnya biasa ditemui di daerah sepanjang aliran sungai atau sepanjang sungai. Sedangkan untuk kawasan perbukitan dan pegunungan mempunyai rata-rata tingkat ketinggian lebih dari 1000mdpl dengan tingkat kemiringan yaitu 300%. Kondisi tersebut akan mempengaruhi peluang budidaya suatu jenis komoditi, persediaan air, hidrologi, potensi dan kerentanan terhadap erosi tanah. Hampir sebagian Provinsi Kalimantan Timur jika dilihat dari topografi tersebut memiliki tingkat kemiringan lahan di atas 40%, yang mana 43,22% dari daerah tersebut berada di ketinggian 100-1000mdpl (BAPPEDA, 2018).

C. Demografis Provinsi Kalimantan Timur

Pada umumnya dalam pertumbuhan penduduk biasanya dimaknai sebagai perubahan populasi dimana sewaktu-waktu dapat dihitung sebagai adanya perubahan baik penurunan maupun peningkatan jumlah populasi berdasarkan atas “per waktu unit” dalam pengukuran.

Tabel 3.1
Proyeksi Jumlah Penduduk di Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Jenis Kelamin 2019-2045

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2019	1.800.000	1.700.000	3.500.000
2020	1.900.000	1.700.000	3.600.000
2025	1.900.000	1.800.000	3.700.000
2030	2.000.000	2.000.000	4.000.000
2045	2.250.000	2.240.000	4.490.000

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan data statistik diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 3,5 juta jiwa dengan rincian 1,8 juta laki-laki dan 1,7 juta perempuan. Maka sesuai dengan hal ini, diproyeksi hingga tahun 2045 bahwa pertambahan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur setiap 5 tahun meningkat dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 4,41%. Pada tahun 2020, diprediksi 1,9 juta laki-laki dan 1,7 juta perempuan telah berada di Kalimantan Timur. Adapun 5 tahun kemudian peningkatan jumlah penduduk di prediksi terdapat 3,7 juta jiwa yang berarti meningkat hinga 5,86%. Pada 2030, jumlah penduduk akan meningkat 5,02% menjadi 4 juta jiwa. Hingga tahun 2045 mendatang maka jumlah penduduk di Kalimantan Timur diproyeksi akan meningkat 5,8% dari lima tahun sebelumnya dengan rincian penduduk laki-laki dan perempuan hanya berkisar 3,8 ribu jiwa dimana komposisi penduduk laki-laki berjumlah 2,25 juta dan perempuan berjumlah 2,24 juta jiwa (BPS, 2019).

D. Kondisi Sosial, Budaya dan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur

Kondisi sosial budaya di Provinsi Kalimantan Timur dapat dipandang melalui dua aspek, yaitu di bidang agama dan pendidikan. Pada bidang agama, Provinsi Kalimantan Timur cukup diketahui sebagai daerah yang agamis. Sebesar 85,57% penduduk beragama islam dan banyaknya jumlah tempat ibadah membuat suatu korelasi positif. Sedangkan pada bidang Pendidikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indeks komposit yang dikembangkan UNDP untuk mengukur pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif. IPM berfungsi untuk mengukur indeks pendidikan melalui survey yang dilakukan oleh Susenas KOR agar memperoleh data rata-rata lama sekolah sebagai bagian dari pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas. Namun, sejak tahun 1995 UNDP mengganti angka melek dengan partisipasi sekolah untuk memperoleh data rata-rata lama sekolah karena sulitnya memperoleh dengan angka melek. Kemampuan membaca dan menulis menjadi indikator angka melek huruf..

Demi meningkatkan pembangunan dan kualitas sumberdaya manusia di wilayah Kalimantan Timur pemerintah provinsi setempat membuat beberapa program untuk pendidikan dasar hingga sekolah menengah sebagai partisipasi sekolah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur. Program tersebut antara lain yaitu program wajib belajar 12 tahun, yang menggunakan dana APBD sebesar 20% di bidang pendidikan, dan program beasiswa untuk setiap siswa di Provinsi Kalimantan Timur. Program-program tersebut diharapkan menjadi kunci utama dalam membangun kualitas sumberdaya manusia di masa depan.

Program pendidikan perlu diimplementasikan ke masyarakat. Untuk itu, partisipasi sekolah wajib dikaji melalui angka partisipasi. Angka partisipasi sekolah dapat diukur dengan menggunakan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Adapun data mengenai angka partisipasi sekolah yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3.2

Data Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur

Jenjang Pendidikan	APK			APS			APM		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
SD	110,32	112,61	110,04	99,35	99,63	99,54	96,81	97	97,13
SMP	92,04	97,90	95,28	97,89	97,62	98,18	78,96	79,06	79,20
SMA/SMK/MK	85,97	90,31	95,38	80,50	80,68	80,81	67,41	67,78	67,92
Perguruan Tinggi	-	-	26,43	-	-	28,88	-	-	21,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Adapun Etnis paling dominan di Kalimantan Timur ialah suku Jawa sebesar 30,24% yang tersebar di hampir seluruh wilayah terutama daerah transmigrasi hingga perkotaan. Etnis terbesar kedua ialah suku Bugis yaitu sebesar 20,81% yang menempati dikawasan pesisir dan perkotaan. Etnis tergesar yang ketiga ialah suku Banjar sebesar 12,45% yang berada di pusat-pusat kota di Kalimantan Timur yaitu dominan di Kota Samarinda dan Balikpapan. Selanjutnya etnis lain seperti suku Buton (1,25%), Madura

(1,32%), Sunda (1,57%), Paser(1,89%), Toraja (2,21%), Kutai (7,80%), dan Dayak (9,94%) (BPS, 2019).

Dari segi perekonomian yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dimana hasil utama di Provinsi ini ialah minyak, gas dan batubara. Sektor lain yang tengah dikembangkan oleh pemerintah ialah agrikultur, pariwisata dan industri pengolahan.

3.2 Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur

A. Profil Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur

Pada hakikatnya Jaringan Advokasi Tambang atau yang biasa dikenal dengan JATAM ialah sebuah organisasi masyarakat, organisasi non pemerintahan dan organisasi berbasis komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah publik seperti HAM, gender, masyarakat adat, lingkungan hidup dan isu-isu keadilan sosial dalam pertambangan dan migas.

Jatam lahir pada tahun 1995, dimana ada pertemuan dalam sebuah workshop yang mempermukan ornop pendampingan korban tambang dengan masyarakat korbang tambang. Workshop ini diadakan di Banjarmasin dengan melahirkan kesadaran dan kesepakatan bagi seluruh partisan atau audience pada saat itu untuk membentuk suatu organisasi dalam memberikan advokasi tambang.

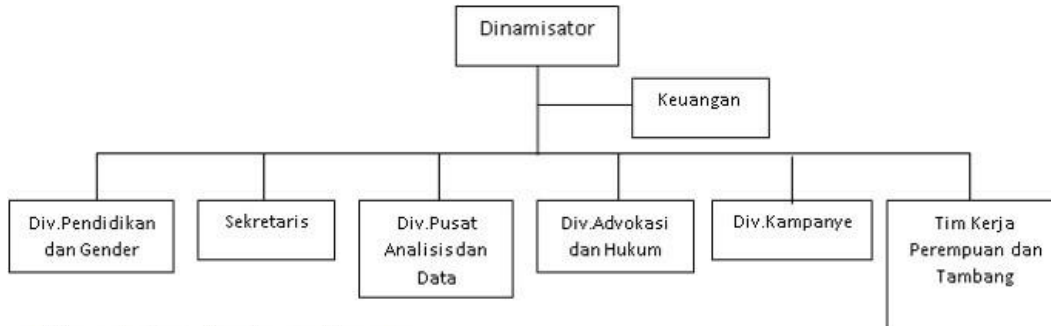
Dengan adanya Jatam di lapisan masyarakat akan memudahkan masyarakat untuk memberikan rasa keluh kesah terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan kondisi yang saat ini mereka alami. Jatam sendiri membuat suatu gerakan yang dimana dapat menampung aspirasi dan keluh kesah masyarakat terhadap pemerintah akibat dampak negatif dari

terbentuknya lubang tambang. Disamping itu juga, Jatam mendirikan posko keluhan bagi masyarakat untuk melaporkan keluhan-keluhan terkait pelanggaran-pelanggaran hukum lingkungan. Hal ini sangat penting karena masyarakat lokal menyaksikan dan merasakan dampaknya secara langsung. Apabila pemerintah tak kunjung menegaskan para perusahaan untuk memperbaiki lubang tambang maka kerusakan alam dan korban akibat dari proses penambangan tersebut akan terus bertambah.

Jatam menampung aspirasi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia akibat dari tambang dan migas, salah satunya berpusat di Provinsi Kalimantan Timur. Aktivitas pertambangan dan migas yang mengganggu masyarakat tidak hanya dari segi lingkungan tetapi juga kondisi sosial ekonomi membuat terbentuknya Jatam. Oleh karena itu, lingkungan yang sehat merupakan tujuan dari adanya Jatam agar masyarakat merasa nyaman dan aman. Dengan jumlah anggota Jatam yang tidak banyak membuat Jatam kurang kuat dalam bekerja penuh untuk memperjuangkan hak rakyat, sehingga Jatam membuka untuk siapapun bisa bergabung dengan Jatam agar Jatam semakin kuat dan bisa memperjuangkan pengelolaan pertambangan. Jatam sendiri bekerja dilakukan dalam bentuk pendampingan, riset, pendidikan, kampanye untuk penyadaran publik, advokasi dan litigasi.

Gambar 3.3

Struktur Organisasi Jaringan Advokasi Tambang



- Dinamisator : Pradarma Rupang
- Sekretaris : Theresia Jari
- Keuangan : Mareta Sari
- Div. Pusat Analisis dan Data : Achmad Fachri Aziz
- Div. Pendidikan dan Gender : Abdallah Naem
- Div. Advokasi dan Hukum : Andika Abbas
- Div. Kampanye : Romiansyah
- TKPT : Mareta Sari

B. Mandat

Adapun dalam pemberian Mandat yang disusun dalam pertemuan nasional di tahun 1999 di Tomohon Sulawesi Utara, dan tahun 2003 di Ciloto Bogor. Dalam pertemuan tersebut Jatam memberikan mandat dan posisi strategis untuk mendukung adanya upaya dalam moratorium atau dalam frame untuk menata ulang dan perbaiki pengelolaan seluruh pertambangan yang ada di Indonesia, serta mendukung pengelolaan yang adil dan bijak dalam mengeksplorasi kelimpahan tambang dan sumber daya energi yang dapat menjamin keberlanjutan keselamatan dan keamanan masyarakat dan ekosistem di Indonesia. Adapun mandat tersebut ialah “Melawan Penghancuran dengan

Membangun Produksi Konsumsi Tanding yang Berkeadilan dan Berdaya-Pulih”.

C. Keorganisasian dalam Jaringan Advokasi Tambang

Dalam keorganisasian di Jatam, untuk mencapai tujuan organisasi yaitu mendapatkan hak-hak masyarakat untuk hidup tenang dengan melawan perusahaan tambang dan migas yang membuat kerusakan ekosistem, Jatam membuka bagi siapapun baik individu maupun lembaga agar sebanyak-banyak sumberdaya manusia yang ada bisa melakukan perlawanan. Adapun keanggotaan atau konstituen Jatam ialah individu, masyarakat korban, dan LSM/NGO yang berkecimpung di bidang advokasi tambang.

D. Nilai-nilai Dasar yang dimiliki Jaringan Advokasi Tambang

Nilai-nilai dasar yang dianut dan dimiliki oleh Jaringan Advokasi Tambang ialah asas demokratis, keadilan gender, anti kekerasan, partisipatif, non partisipan, solidaritas, non diskriminatif, serta perilaku yang bijak terhadap ekosistem dan keadilan.

E. Etika bagi Jaringan Advokasi Tambang

Adapun etika-etika yang harus ditaati atau dipatuhi oleh seluruh konstituen atau anggota dari Jaringan Advokasi Tambang yaitu tidak menerima dan mendukung atau mengerjakan apapun dengan pelaku perusahaan tambang yang telah melakukan kerusakan dan mencemari lingkungan tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu kepada masyarakat ataupun Jatam baik dalam bentuk dana, kerjasama, ataupun program yang dapat menyimpang dari tujuan berdirinya Jatam. Apabila anggota Jatam atau konstituen terbukti telah

melanggar etika Jatam atau membuat kerugian terhadap Jatam, maka akan dikeluarkan dan kehilangan hak sebagai konstituen atau keanggotaan.

